



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN DISPENSASI  
KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21) ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan yang diberikan kepada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 2**

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3**

Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Pasal 5**

(1) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Izin Dispensasi Kelebihan Muatan yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap Triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Pebruari 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Pebruari 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 9**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2006  
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2006

**ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN  
 DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL KELEBIHAN MUATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>KABUPATEN :</b>		
1	SEMARANG	462,316,000.00	
2	KENDAL	136,439,000.00	
3	DEMAK	296,815,000.00	
4	GROBOGAN	187,555,000.00	
5	PATI	120,771,000.00	
6	KUDUS	119,223,000.00	
7	JEPARA	181,327,000.00	
8	REMBANG	611,461,000.00	
9	BLORA	202,259,000.00	
10	PEKALONGAN	119,352,000.00	
11	BATANG	184,309,000.00	
12	PEMALANG	127,734,000.00	
13	TEGAL	131,281,000.00	
14	BREBES	746,578,000.00	
15	BANYUMAS	241,660,000.00	
16	CILACAP	293,739,000.00	
17	PURBALINGGA	133,602,000.00	
18	BANJARNEGARA	133,924,000.00	
19	MAGELANG	286,346,000.00	
20	TEMANGGUNG	257,753,000.00	
21	WONOSOBO	140,308,000.00	
22	PURWOREDJO	329,845,000.00	
23	KEBLIMEN	127,412,000.00	
24	KLATEN	137,600,000.00	
25	BOYOLALI	206,168,000.00	
26	SRAGEN	427,762,000.00	
27	SUKOHARDJO	121,802,000.00	
28	KARANGANYAR	137,342,000.00	
29	WONOGIRI	243,788,000.00	
	<b>KOTA :</b>		
30	SEMARANG	347,202,000.00	
31	PEKALONGAN	95,108,000.00	
32	SURAKARTA	124,382,000.00	
33	SALATIGA	103,233,000.00	
34	TEGAL	98,268,000.00	
35	MAGELANG	92,336,000.00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>7,707,000,000.00</b>	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO